



# DKI Terapkan Parkir Elektronik



Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

JAKARTA — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menginginkan semua parkir *on street* di seluruh Ibu Kota menggunakan *parking meter* atau *e-parkir*. “Nanti kami namakan terminal parkir elektronik,” kata Ahok—sapaan Basuki—di sertra ikan hias, Jalan Gunung Sahari, Jakarta Pusat, kemarin.

Penggunaan *e-parkir* dilakukan untuk menekan potensi kebocoran uang dari sektor perparkiran. “Jadi, sekarang tidak ada lagi uang yang lari kepada oknum yang tidak jelas,” ujar mantan Bupati Belitung Timur itu.

Ahok juga berencana bekerja dengan pihak swasta dalam kaitan dengan penggunaan parkir elektronik. Gedung-gedung yang memiliki parkir akan dipaksa Ahok untuk menerapkan sistem serupa seperti di Jalan Haji Agus Salim atau Jalan Sabang, Jakarta Pusat. “Termasuk nanti gedung-gedung pun kita paksa seperti itu.”

Pola pembagian keuntungan untuk pengelola gedung sama seperti yang diterapkan di Jalan Sabang. Pengelola dapat 70 persen dari pendapatan, sedangkan pemerintah sisanya.

Penerapan parkir elektronik diharapkan mampu memenuhi ekspektasi penerimaan pemerintah sebesar Rp 400 miliar. “Saya berharap sistem parkir ini dapat menambah pemasukan. Dulu, sebelum ada sistem ini, pendapatan per hari hanya Rp 500 ribu, sekarang menjadi Rp 10 juta per hari di Sabang ini,” kata Ahok.

Kepala Unit Pengelolaan (UP) Perparkiran Dinas Perhubungan DKI Jakarta Sunardi Sinaga menghitung idealnya selama setahun pendapatan kotor dari parkir di jalan mencapai Rp 400 miliar. Tetapi saat ini pendapatan kotor yang diperoleh pemerintah hanya sebesar Rp 26 miliar per tahun. “Jika dihitung, kebocoran penerimaan negara itu sangat besar, bisa ratusan miliar,” ujarnya. Dari Rp 26 miliar itu, pemerintah hanya menerima pendapatan bersih Rp 7,8 miliar. Sebab, 70 persen pendapatan kotor diperuntukkan bagi operasional, misalnya gaji juru parkir.

● ERWAN HERMAWAN | DINI PRAMITA